

Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar

Taufik (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Email: taufik77@gmail.com

Abstract

This paper is about of local government in empowering coastal communities throughly empowerment programs that have been run in Polewali. Data accumulation methods is used in this study is the method of observation, documentation, and Interview. The results of research that has been done to prove that the role of the local Government in Coastal Community Empowerment through empowerment programs in Polewali been implemented in full in accordance with applicable regulations. Although there is a lack of coordination in the dissemination of this program. Helpful assistance fund to help financial problems (capital) and improving the productivity of fishermen.

Keywords: *empowerment, coast, fisherman*

Abstrak

Tulisan ini mengenai peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat pesisir melalui program pemberdayaan yang telah dijalankan di Kecamatan Polewali. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melauai program pemberdayaan di Kecamatan Polewali telah dilaksanakan secara utuh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Walaupun ada sedikit kurang koordinasi dalam sosialisasi program ini. Dana bantuan bermanfaat membantu masalah keuangan (permodalan) dan meningkatkan produktifitas nelayan.

Kata kunci: *pemberdayaan, pesisir, nelayan*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km dengan jumlah penduduk Indonesia yang hidup di kawasan pesisir sejumlah 16,42 juta jiwa. Sedangkan desa pesisir yang ada di Indonesia berjumlah 8.090 yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan sepanjang garis pantai ini terdapat wilayah pesisir yang relatif sempit tetapi memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati sumber daya buatan, serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat kare-

na di tunjang oleh kondisi geografi yang memiliki garis pantai begitu panjang ditambah besarnya potensi yang ada di laut, membuat bangsa indonesia semakin kaya akan sumber daya alamy.

Pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting apabila ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa

terhadap manusia. Sejalan dengan penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, nilai wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang timbul karena ketidaksepehaman pemanfaatan yang timbul akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No.1 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dimana dalam pasal 63 yang berbunyi "Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraannya dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainnya".

Dari undang-undang diatas menegaskan bahwa pemerintah memegang peranan penting dalam memantau secara berkala, kualitas lingkungan pesisir, baik wilayah darat, payau dan laut/pantai, ditempat-tempat masyarakat melakukan aktivitas budaya. Dengan demikian pemerintah punya data dasar kualitas wilayah pesisir, untuk mengetahui arah pola perkembangannya.

Salah satu wilayah pesisir Indonesia adalah di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yang dimana sebagian masyarakatnya juga menggantungkan proses kehidupannya dari hasil laut. Letak Kecamatan Polewali sangat strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi, terlebih lagi dijadikan sebagai ibukota Kabupaten Polewali Mandar. Salah satu daerah perbatasan Kecamatan Polewali adalah Selat Makassar, artinya sepanjang daerah ini adalah daerah pesisir. Secara geografis Kecamatan Polewali memiliki sembilan kelurahan yang terdiri dari tujuh

kelurahan di daerah pantai dan dua kelurahan bukan daerah pantai.

Saat ini masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir ini hidup dalam keadaan/kondisi yang kurang baik terlihat dari keadaan lingkungan tempat tinggal/rumah, secara visual tampak tidak terawat dan jauh dari kata rumah layak huni, banyaknya anak-anak yang putus sekolah yang menyebabkan masyarakat pesisir menjadi miskin tidak lain adalah kurangnya perhatian dari pemerintah. Peristiwa ini terjadi karena pola kekuasaan yang sangat sentralistik sehingga masyarakat yang ada di daerah pesisir kurang, bahkan tidak mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah.

Salah satu indikator lain dari kemiskinan masyarakat pesisir di Kecamatan Polewali antara lain, adalah pekerjaan yang tidak tetap karena sangat tergantung pada musim. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat pendapatan yang tidak menentu, pendapatan mereka yang tergolong pendapatan harian akan habis dalam satu hari dan terkadang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi terutama hal-hal yang sifanya pokok seperti pangan. Untuk mengatasi masalah ini maka kehidupan keluarga pada umumnya mengikutsertakan istri dan anak-anaknya untuk bekerja agar dapat membantu mencari penghasilan tambahan. Sehingga anak-anak nelayan banyak yang putus sekolah atau sekolahnya hanya sampai pada tingkat sekolah dasar saja.

Dari uraian di atas kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir di berbagai kawasan Kecamatan Polewali secara umum ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) karena sebagian besar penduduk hanya lulus sekolah dasar atau belum tamat sekolah dasar. Hal-hal seperti ini merupakan hambatan potensial bagi masyarakat pesisir untuk mendorong dinamika pembangunan di wilayahnya. Akibatnya, sering terjadi kelemahan bargaining position masyarakat pesisir

dengan pihak-pihak lain di luar kawasan pesisir, sehingga mereka kurang memiliki kemampuan mengembangkan kapasitas dirinya dan organisasi atau kelembagaan sosial yang dimiliki sebagai sarana aktualisasi dalam membangun wilayahnya, Kusnadi (dalam Heri Purwanto 2007 : 1 – 2).

Dalam Undang Undang RI No. 23 tahun 2014 Perubahan Ketiga atas Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan dalam pasal 1 (ayat 2 dan 5) yang berbunyi “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ayat 5 yang berbunyi “Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat”.

Dari undang-undang diatas menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah diberi keluasaan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arah Pembangunan Nasional pada hakekatnya mempunyai tujuan membangun manusia seutuhnya, hal ini mengandung makna bahwa pembangunan fisik melalui pengadaan sarana dan prasarana harus sejalan dengan pem-

angunan mental psikologi manusia. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan manusia dewasa ini adalah “Pemberdayaan”. Tentunya implementasinya sangat komprehensif dan terintegrasi dalam strategi pembangunan termasuk pada tahap perencanaan dan pelaksanaannya.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Saat ini banyak program pemberdayaan yang mengklaim sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat (bottom up), tapi ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut sehingga tidak aneh banyak program yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat.

Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Sistem gender juga berlaku di kehidupan para nelayan. Pelaut merupakan kaum laki-laki dan perempuan adalah penjual dan pengolah hasil tangkapan. Oleh sebab itu pemegang ekonomi pasar sering diambil alih oleh kaum perempuan. Namun sampai saat ini perempuan hanya berperan sebatas penjual dan pengolah hasil tangkapan sehari-hari saja tanpa ada inisiatif dari pemerintah dalam hal pengembangan pengelolaan hasil laut yang bernilai ekonomis demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Namun apakah Pemerintah Daerah dalam realisasinya sudah mengimplementasikan tugas pemberdayaan terhadap masyarakat

dengan baik? Disinilah akan terlihat apabila pelaksanaan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan masyarakat pesisir, mutlak diperlukan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul: "Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar"

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Dearah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dan sentra-sentra perikanan merupakan salah satu kegiatan strategis dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di wilayah pesisir sebanyak 7,87 juta jiwa atau sebesar 25,14% dari total jumlah penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta jiwa. Di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2013 garis kemiskinan Rp 182.396 (BPS 2013).

Tujuan PNPM Mandiri KP adalah untuk meningkatkan kemampuan usaha dan kesejahteraan, pengembangan wirausaha anggota KUKP serta meningkatnya kualitas lingkungan. Sasaran PNPM Mandiri KP yaitu berkembangnya KUKP di Kabupaten/Kota yang mencakup kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan usaha garam rakyat serta masyarakat pesisir lainnya.

Organisasi pelaksana PNPM Mandiri-KP tingkat daerah; a) Sosialisasi, Kegiatan sosialisasi merupakan proses untuk menumbuhkan kemandirian dan keberlanjutan upaya penanggulangan kemiskinan dari, oleh dan untuk masyarakat melalui proses pembelajaran dan pelebagaan nilai-nilai. Sosialisasi program di tingkat kabupaten/kota diperlukan untuk menyebarluaskan informasi kegiatan kepada sasaran, yaitu masyarakat pesisir yang dilakukan oleh aparat daerah dan pemangku kepentingan terkait termasuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di daerah yang bersangkutan; b) Pembinaan, Untuk meningkatkan koordinasi di tingkat Provinsi, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk membentuk Tim Pembina yang diketuai oleh Kepala Dinas Provinsi dengan anggota masing-masing bidang yang menangani teknis serta unsur penyuluhan di tingkat daerah; c) Pendampingan Tenaga pendamping terdiri dari Penyuluh Perikanan PNS dan/atau PPTK (Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak). Implementasi program PEMP di Kecamatan Polewali saat ini diharapkan mampu menunjukkan hasil yang positif sesuai dengan tujuannya. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi dan kajian terhadap program tersebut sebagai salah satu proses penting dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu permasalahan.

Data dan informasi yang diperoleh dari evaluasi dan kajian tersebut sangat penting dalam merumuskan kembali alternatif-alternatif program yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memecahkan permasalahan masyarakat pesisir.

Dampak Program Pemberdayaan Dilihat dari Peningkatan Pendapatan Peningkatan pendapatan merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan suatu program pengentasan kemiskinan seperti PNPM Mandiri-KP. Untuk mengukur indikator ini adalah dengan membandingkan pendapatan peserta penerima dana BLM PNPM Mandiri-KP

setelah mengikuti program dengan pendapatan sebelum program. Peningkatan pendapatan bisa juga dilihat dari jumlah persentase kenaikan pendapatan individu dari setiap kelompok. Dari hasil wawancara informan yang menjadi peserta penerima BLM PNPM Mandiri-KP yaitu kelompok nelayan, pembudidaya air tawar dan pembudidaya air payau, semua informan yang menjadi peserta penerima bantuan dana BLM PNPM Mandiri-KP memiliki pendapatan yang meningkat dan hasilnya disajikan pada tabel berikut; Peningkatan Pendapatan Informan Nelayan dari Kelompok "Sandeq Mandar" Setelah menerima dana PNPM Mandiri-KP.

Dilihat dari tabel maka pendapatan masyarakat nelayan Rp 330.000. Peningkatan pendapatan itu berkaitan dengan pendapatan masyarakat nelayan penerima BLM PNPM Mandiri-KP meningkat karena dapat memanfaatkan tambahan modal yaitu Bantuan Langsung Masyarakat yang mereka terima walaupun dana tersebut menurut hasil wawancara tanggal 14 Januari 2015 yaitu Sanawi dari ketua kelompok Sandeq Mandar mengatakan : "Meskipun bantuan dana BLM PNPM Mandiri-KP jauh dari biaya yang dibutuhkan untuk keperluan melaut mulai dari pembelian perahu, alat tangkap maupun biaya lainnya akan tetapi saya benar-benar memanfaatkan untuk membeli sarana yang dibutuhkan dan saya termotivasi untuk dapat melaut karena disamping untuk membiayai kebutuhan sehari-hari untuk keluarga juga ada beban untuk mengembalikan dana yang diterima". Hal ini juga disampaikan Baba, Sekretaris kelompok Sandeq Mandar dari hasil wawancara pada tanggal 14 Januari 2015 mengatakan : "Untuk dapat lebih meningkatkan pendapat nelayan seperti saya yang benar-benar butuh dana sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk membeli perahu, dan peralatan alat tangkap. Sampai saat ini saya harus menyewa perahu untuk melaut, tapi saya bersyukur karena pemerintah telah memberikan bantuan untuk

membeli peralatan alat tangkap (jaring), dan berkat bantuan dana tersebut alat tangkap (jaring) saya yang sudah rusak saya dapat membeli yang baru setelah ada bantuan sehingga saya dapat melaut setiap harinya dan meningkatkan pendapatan saya". Pada saat yang sama dua anggota kelompok nelayan Sandeq Mandar juga yaitu Nurdin dan Darru yang diwawancarai pada tanggal 14 Januari 2015 memberi komentar yang sama : "Mudah-mudahan tahun berikutnya kami masih diberi bantuan lagi karena baru kali ini saya mendapat bantuan walaupun hanya cukup untuk membeli sarana alat tangkap dan kami belum mampu membeli perahu akan tetapi kami merasakan manfaatnya karena dapat meningkatkan pendapatan dan alhamdulillah saya dapat mengangsur cicilan bantuan saya lewat kelompok. Saya sangat membutuhkan perahu dan mesin katintin 9 PK karena selama ini saya hanya memiliki perahu lepa-lepa tanpa mesin dan hanya mendayun hingga jangkauan melaut saya hanya di daerah pesisir saja".

Pada saat yang sama anggota kelompok pembudidaya air payau "Rahmat" yaitu Rajjab dalam wawancara pada tanggal 16 Januari 2015 mengatakan : "Dengan adanya bantuan dana BLM PNPM Mandiri-KP saya dapat meningkatkan pendapatan saya sebesar Rp 200.000 meskipun sebenarnya masih membutuhkan dana karena apa yang saya ajukan ke Dinas Kelautan dan Peikanan tidak sepenuhnya dikabulkan akan tetapi saya tetap bersyukur karena sebelum adanya bantuan pendapatan saya hanya Rp 650.000 dan setelah mendapatkan bantuan saya dapat meningkatkan pendapatan saya menjadi Rp 850.000. Tapi pemerintah perlu memperhatikan kondisi masyarakat petani tambak karena di tambak merupakan kegiatan usaha yang banyak mendapatkan kendala terutama penyakit udang sehingga perlu mendapatkan bantuan yang tinggi".

Anggota kelompok pembudidaya air payau dalam wawancara pada tanggal 16 Januari

2015 yaitu Mustari mengatakan : “Sebenarnya saya masih membutuhkan dana untuk kelangsungan usaha tetapi apa yang diberikan bantuan dari Dinas saya terima dengan ikhlas karena sangat membantu dalam penambahan modal usaha saya sehingga pendapatan saya dapat meningkat dari Rp 650.000 menjadi Rp 850.000, artinya saya dapat meningkatkan pendapatan saya sebesar Rp 200.000 meskipun hasil itu hanya cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga saya. Mudah-mudahan tahun berikutnya apabila kelompok saya mendapatkan bantuan lagi agar sesuai apa yang kita minta dan kita butuhkan sehingga peningkatan pendapatan lebih tinggi lagi”.

Menurut informan dalam wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 yaitu H.Tahir salah satu informan yang memiliki pendapatan sebelum program sebesar Rp 1.050.000 mengatakan: “Saya masuk anggota penerima bantuan PNPM Mandiri-KP karena saya mempekerjakan orang yang tidak mampu, karena saya yang punya lahan sehingga saya masuk dalam daftar anggota. Ini dikhawatirkan kalau anggota pekerja saya yang diberi langsung dana, bisa saja berhenti bekerja sebagai pekerja tambak dan dana tersebut tidak bias dipertanggungjawabkan pengembaliannya kalau yang bersangkutan tidak ada lagi. Tapi dana itu saya peruntukkan ke tambak yang dipekerjakan oleh pekerja saya dan kalau ada penggantinya maka yang bersangkutan melanjutkan penggunaan dan pengembalian dana itu, dan dengan adanya dana itu baik saya maupun pekerja saya dapat meningkatkan pendapatan karena saya membagi hasilnya 50:50”.

Hasil wawancara ketua kelompok air tawar “Cahaya Baru” yaitu Rujiyo pada tanggal 18 Januari 2015 mengatakan : “Meskipun dana yang kami terima belum mencukupi apa yang kami butuhkan akan tetapi kami dapat meningkatkan pendapatan. Sebelum saya menerima bantuan, saya sering ikut menjadi tukang batu untuk membiayai adik dan ibu

saya. Karena ada lahan saya yang kosong sehingga saya membuat kolam pembenihan ikan lele, pada saat sebelum menerima bantuan dana BLM PNPM Mandiri-KP saya hanya dapat mendapatkan hasil rata-rata Rp 700.000 tetapi setelah ada bantuan meningkat pendapatan saya menjadi Rp 750.000 sehingga saya sekarang fokus dalam usaha pembenihan. Meskipun meningkat pendapatan saya tetapi masih hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya”. Harsono, sekretaris kelompok pembudidaya air tawar “Cahaya Baru” dalam wawancara pada tanggal 19 Januari 2015 mengatakan : “Dengan adanya bantuan dana BLM saya dapat meningkatkan pendapatan saya sebesar Rp 50.000, peningkatan pendapatan itu untuk pengembalian dana bantuan yang saya dapatkan. Meskipun penambahan pendapatan itu tidak terlalu banyak akan tetapi dana tersebut sangat membantu saya untuk menambah kolam pembenihan ikan lele yang saya lakukan” Sukiman selaku bendahara kelompok pembudidaya air tawar “Cahaya Baru” dalam wawancara pada tanggal 19 Januari 2015 mengatakan : “Ada manfaat yang saya rasakan setelah ikut program PNPM Mandiri-KP yaitu dengan bersungguhsungguh melakukan usaha pembenihan dan pembesaran ikan lele karena ada tanggung jawab mengembalikan dana BLM. Disamping itu saya dapat meningkatkan pendapatan saya sebesar Rp 350.000 dari pendapatan saya sebelum menerima bantuan yaitu Rp 750.000 menjadi Rp 1.100.000. Meskipun dana yang saya terima masih kurangan tetapi saya dapat membeli induk ikan lele dan pakan sehingga saya dapat meningkatkan produksi saya. Sekiranya tahun depan kelompok kami masih diberi bantuan agar supaya modal yang kami butuhkan cukup untuk keperluan peningkatan kapasitas produksi benih ikan lele karena akhir-akhir ini banyak yang berminat untuk kegiatan pembesaran ikan lele yang membutuhkan benih ikan lele”.

Khoiri dan Nurhadi, anggota kelompok pembudidaya air tawar “Cahaya Baru” dalam wawancara pada tanggal 19 Januari 2015 mengatakan: “Setelah saya menerima bantuan dana BLM PNPM Mandiri-KP pendapatan saya meningkat sebesar Rp 150.000 berkat bantuan tersebut. Peningkatan pendapatan saya itu sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari saya. Sebelum ada bantuan dana saya selalu bekerja di sawah dan kurang memperhatikan lahan kolam saya, dan setelah mendapatkan dana kelompok kami menyediakan induk ikan lele dan dibeli anggota kelompok dan alhamdulillah saya dapat meningkatkan produksi. Pendapatan saya sebelum ada bantuan Rp 750.000 perbulan dan setelah saya mendapat bantuan meningkat menjadi Rp 900.000 sehingga dapat menambah biaya hidup sehari-hari saya. Walaupun dana bantuan itu belum sepenuhnya mencukupi untuk biaya usaha akan tetapi sangat membantu dalam melakukan usaha pembenihan ikan lele saya”.

Kelompok pembudidaya air tawar penerima BLM tiap orang rata-rata menerima bantuan sebanyak Rp 2.800.000 untuk melengkapi sarana dan prasarana dibutuhkan dana sebesar Rp5.800.000. Berkaitan dengan sasaran program masyarakat pembudidaya air tawar yang menerima BLM PNPM Mandiri-KP adalah penduduk yang benar miskin. Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat pembudidaya air tawar yang menjadi sasaran juga merupakan penduduk miskin. Pendapatan di kelompok pembudidaya air tawar juga mengalami peningkatan dan ini menandakan program tersebut sangat bermanfaat bagi penerima BLM PNPM Mandiri-KP dan target sasaran tepat dalam penyaluran program.

Dampak Program Pemberayaan Dilihat Dari Pengurangan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat serius, tumbuh disetiap dimensi dan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Pemerintah sendiri telah

mencanangkan berbagai program pengentasan kemiskinan. Penggalakan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat terus dilaksanakan, dengan demikian pemberian bantuan kesetiap masyarakat yang membutuhkan berupa kucuran dana guna mendukung perencanaan masyarakat dalam pengembangan daerahnya dan juga program pemerintah berupa pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan di pedesaan. Hal ini belum mengangkat masyarakat marginal dan terpinggirkan dari garis kemiskinan. Kemiskinan di sekitar kita telah menjadi bagian dari mentalitas masyarakat sehingga setiap individu akhirnya merasa nyaman dengan hidupnya meskipun bila dilihat secara kasat mata justru kehidupan mereka dipandang tidak layak, dapat pula kemiskinan itu terbentuk dengan eksploitasi kelas sosial di atasnya.

Secara sosiologis kemiskinan tidak saja berasal dari kelemahan diri tetapi juga tidak bisa dinafikan sebuah bentukan sosial yang merancang ketidakmampuan baik individu maupun masyarakat untuk melakukan perubahan dalam dirinya. Pada tahun 2013 garis kemiskinan untuk desa Wattang dan Takatidung sebesar Rp 182.396 maka yang digolongkan sebagai keluarga miskin adalah mereka yang berpendapatan kurang dari Rp 182.396

Kendala yang Dihadapi dalam Proses Penyaluran Program Pemberdayaan Dari Pemerintah Berikut petikan wawancara dengan Bapak Mustari pada tanggal 14 Januari 2015 : “pada waktu itu hanya ketua kelompok, tim pendamping dan kepala lurah saja yang mengikuti sosialisasi yang diadakan Dinas Kelautan dan Perikanan sehingga kebanyakan masyarakat mengetahui dari mulut ke mulut tentang program ini” Hal tersebut seperti yang disampaikan Lurah Wattang.

Berikut adalah petikan wawancara dengan Bapak Lurah Wattang : “memang dalam kenyataannya pemberian informasi tentang bantuan PNPM KP tidak terlalu jelas, ada me-

mang sosialisasi tapi banyak yang tidak tahu dan tidak mengikuti. Nelayan mengetahui dari saya dan ketua kelompok, itupun kalau ada yang tanya” (wawancara 14 Januari 2015).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Hasan selaku tim pendamping di Kelurahan Wattang. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Hasan “Yang datang waktu sosialisasi hanya ketua kelompok, saya dan pak lurah saja, nelayan dan pembudidaya banyak yang tidak datang, walaupun undangan telah disebar” (wawancara 14 Januari 2015).

Sedangkan menurut Bapak Budiman selaku Kasi Pengembangan Wilayah Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar tahapan sosialisasi telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri No 10 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikanan tahun 2014. Beliau menambahkan bahwa sosialisasi telah dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat “tahap sosialisasi telah dilaksanakan oleh Dinas kelautan dan Perikanan, tetapi masyarakat kurang antusias, mungkin disebabkan karena mereka lebih memilih bekerja daripada datang” (wawancara 15 Januari 2014).

Seperti diungkapkan Bapak Rusli selaku pendamping di Kelurahan Takatidung. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Rusli, “masalah yang dialami nelayan ini waktu pembuatan proposal, karena banyak orang jadi harus menyamakan usul, ada yang minta ini lah, itulah pokoknya susah dek. Terus pak Lurah berinisiatif dengan memberikan beberapa opsi salah satunya pembelian pompa air, akhirnya mereka setuju” (wawancara 15 Januari 2015).

Hal senada diungkapkan oleh bapak Budi-man selaku Kasi Pengembangan wilayah pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar. Berikut petikan wawancara dengan bapak Budiman : “Terkait kendala yang ada dalam Program Penyaluran

Dana Bantuan PNPM KP di Kecamatan Polewali salah satunya adalah pembuatan proposal dari info yang kami peroleh nelayan kesulitan dalam menentukan penggunaan dana tersebut, sehingga mereka tidak tepat waktu dalam menyerahkan proposal” (wawancara 15 Januari 2015).

Selain kendala tersebut juga ditemui dalam hal pembuatan rekening sebagai syarat untuk menyalurkan dana bantuan. Banyak yang tidak melaksanakan anjuran tim pengawas agar ketua kelompok untuk membuat rekening bank baru. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Bapak Helmi selaku tim Pengawas Program Penyaluran Dana Bantuan: “Ada sebagian ketua kelompok yang menggunakan rekening pribadinya, mereka enggan untuk membuat rekening baru. Hal ini menyulitkan kami untuk menyalurkan dana karena rekening bank mereka berbeda (tidak satu bank)” (wawancara 16 Januari 2015).

Kendala lain yang terjadi selama berlangsungnya Program Penyaluran Dana Bantuan adalah sosialisasi yang kurang berjalan dengan baik. Padahal sosialisasi sangat penting karena nelayan bisa memperoleh informasi secara detail mengenai program ini. Hal ini seperti disampaikan bapak Helmi selaku tim pengawas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Helmi: “sosialisasi kami selenggarakan mulai 3 bulan sebelum dana ini cair, tapi banyak masyarakat yang kurang antusias, padahal kami telah meminta kepada Lurah dan tim pendamping untuk mengumumkan acara in kepada masyarakat” (wawancara 17 Januari 2015).

Hal sedikit berbeda disampaikan Bapak Jalil selaku Lurah di Kelurahan Takatidung. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Jalil; “Kami sudah mengumumkan ke masyarakat mengenai akan diadakanya sosialisasi tapi banyak pembudidaya air payau yang lebih memilih untuk bekerja, sebenarnya kurang koordinasi saja dan ada miskomunikasi sedikit” (wawancara 19 Januari 2015).

Sedangkan kendala terkait dengan pengembangan usaha nelayan dan budidaya rakyat berdasarkan penelitian yang dilakukan tidak terdapat kendala yang berarti. Dengan adanya pompa air ketersediaan air yang merupakan salah satu unsur penting dalam kelancaran usaha budidaya air payau dan air tawar ini dapat terpenuhi. Namun secara umum harus diakui kesulitan dalam usaha pengembangan usaha nelayan dan budidaya rakyat di Kecamatan Polewali masih banyak. Usaha masih dalam skala kecil atau masih bersifat usaha sambilan, tergantung musim, pengelolaan masih bersifat tradisional dan keterbatasan permodalan. "Hal-hal teknis dalam pelaksanaan sosialisasi tentang dana bantuan PNPM Mandiri-KP telah dilaksanakan sebaik mungkin sesuai dengan petunjuk dalam Permen Kementrian Kelautan dan Perikanan No 10 tahun 2014. Namun sebaliknya dalam proses implementasi kebijakan selalu terbuk akan terjadinya Implementation Gap yaitu perbedaan antara yang diterapkan dan kenyataan yang didapat.

Hal tersebut tercermin dari kenyataan yang terjadi dilapangan dalam proses sosialisasi mengenai program dana bantuan PNPM Mandiri-KP kepada masyarakat. Kurangnya waktu sosialisasi dan kurangnya antusiasme nelayan dan pembudidaya dalam mengikuti sosialisasi disinyalir menyebabkan informasi yang diterima tidak maksimal sehingga banyak yang mengetahui dari mulut ke mulut atau dari ketua kelompoknya saja. Inilah yang menghambat kelancaran informasi dalam Program Penyaluran Dana Bantuan PNPM Mandiri-KP di Kecamatan Polewali".

KESIMPULAN

Sosialisasi program di tingkat kabupaten/kota diperlukan untuk menyebarluaskan informasi kegiatan kepada sasaran, yaitu masyarakat pesisir yang dilakukan oleh aparat daerah dan pemangku kepentingan terkait termasuk Tim Koordinasi Penanggu-

langan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di daerah yang bersangkutan.

Pembinaan untuk meningkatkan koordinasi di tingkat Provinsi, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk membentuk Tim Pembina yang diketuai oleh Kepala Dinas dengan anggota masing-masing bidang yang menangani teknis serta unsur penyuluhan di tingkat daerah.

Pendampingan, tenaga pendamping terdiri dari Penyuluh Perikanan PNS dan/atau PPTK (Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak).

Berdasarkan hasil survey dan wawancara kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dana bantuan PNPM Mandiri-KP dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu kendala teknis yang dihadapi dalam penyaluran Program Dana Bantuan dan kendala terkait pengembangan usaha nelayan rakyat.

Kendala teknis yang dihadapi dilapangan dalam pelaksanaan program penyaluran dana bantuan ini antara lain kurangnya antusiasme masyarakat atau nelayan untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar sehingga banyak yang tidak mengerti tujuan program ini dilaksanakan, bagaimana tata cara untuk mendapatkan bantuan ini dan bahkan ada yang tidak tahu mengenai program ini. Kemudian kendala teknis lainnya adalah mengenai pengumpulan proposal, banyak dalam hal ini kelompok yang telah dibentuk terlalu lama dalam pembuatan atau penyusunan proposal sehingga banyak yang terlambat dalam menyerahkan proposal pada waktu yang telah ditentukan sehingga proses pencairan danapun menjadi terlambat. Solusi yang dilakukan oleh tim teknis dinas Kelautan dan Perikanan adalah memberi kelonggaran waktu beberapa hari kepada kelompok tersebut untuk menyelesaikan proposalnya.

Kendala yang dialami oleh dinas Kelautan dan Perikanan antara lain tentang pencairan dana bantuan, banyak ketua kelompok yang telah ditunjuk sebagai wakil dari para nelayan tidak melaksanakan anjuran dari tim pe-

ngawas dari dinas Kelautan dan Perikanan untuk membuat rekening bank baru di satu bank atau bank yang sama. Sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan cukup kesulitan mencairkan dana karena rekening yang dimiliki ketua kelompok berbeda-beda. Solusi untuk pemecahan masalah ini seharusnya Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar membuat kesepakatan dengan Ketua kelompok tentang bank mana yang telah ditunjuk untuk membuat rekening dan memberikan sedikit ancaman kepada para penerima dana bantuan yang tidak menjalankan aturan ini dengan tidak mencairkan dana bantuan kepada mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Alimuddin, Muhammad Ridwan, 2005. Orang Mandar, Orang Laut : Kebudayaan Bahari Mandar Mengarungi Gelombang Perubahan Zaman. Jakarta : KPG
- Arief, Hasrat, dkk. 2013. Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. Makassar : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
- Sewang, Anwar. 2010. Etnografi Budaya Masyarakat Mandar. Polewali: Yayasan Maha Putra Mandar.
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2003. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia Jakarta : Refika Aditama
- Amanah, Siti, 2014. Pemberdayaan Sosial Petani- Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing. Pustaka Obor
- Badan Pusat Statistik, 2014. Kecamatan Polewali Dalam Angka. Polewali Mandar.
- Bappenas, Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah. Laporan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, 2000.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. 2014
- Edi, Suharto, 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Refika Aditama, Bandung.
- Kusnadi, 2010. Jelajah Budaya Tahun 2010 "Kebudayaan masyarakat nelayan".
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 2, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2011. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sinar Grafika, Jakarta.
- http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-analisis-apa-ituanalisis.html#_. Diakses tanggal 12 November 2014
- <http://studio6btimbulsloko.wordpress.com/2013/07/14/pengertianwilayah-pesisir/>. Diakses tanggal 12 November 2014
- <http://kim.ung.ac.id/index.php/KIMFIS/article/view/3095/3071> Diakses tanggal 16 November 2014
- http://www.academia.edu/6190234/Aspek_Program_Pemberdayaan_Masyarakat_Pesisir_Nelayan diakses tanggal 16 November 2014
- <http://polewalimandarkab.bps.go.id/file/pub/72/> diakses tanggal 16 November 2014
- Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil